

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DENGAN BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan  
program studi Magister Akuntansi  
Pascasarjana STIE YKPN**



**CLAUDIA ASTIKA PUTRI MAYANGSARI  
12.14.00440**

**PROGRAM PASCASARJANA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA  
2017**

## PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI PROVINSI JAWA TENGAH

Claudia Astika Putri Mayangsari  
claudepotter8@gmail.com  
Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta

### ABSTRACT

*This research analyzed the influence of fiscal decentralization on capital expenditure, economic growth, and social welfare of regency/city in Central Java Province based on the data of year 2010 to 2014. The method used to analyze the hypotheses is the Partial Least Square (PLS) analysis ( $\alpha = 5\%$ ) with WARP-PLS. The results shows that 1) fiscal decentralization has significant effect on capital expenditure of regency/city in Central Java Province; 2) fiscal decentralization has significant effect on economic growth of regency/city in Central Java Province; 3) fiscal decentralization has significant effect on social welfare of regency/city in Central Java Province; 4) capital expenditure has no significant effect on economic growth of regency/city in Central Java Province; 5) capital expenditure has significant effect on social welfare of regency/city in Central Java Province; and 6) economic growth has significant effect on social welfare of regency/city in Central Java Province.*

**Keywords:** *fiscal decentralization, capital expenditure, economic growth, social welfare*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memakai sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan suatu pemerintahan dan kepentingan suatu masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah salah satunya dicirikan dengan adanya desentralisasi fiskal, dimana perumusan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat serta diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kebijakan desentralisasi fiskal yang diberlakukan sejak tahun 2001 melalui pengalihan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah yang diikuti dengan adanya transfer fiskal, pada dasarnya bertujuan untuk efisiensi penyediaan pelayanan sektor publik di daerah terutama infrastruktur agar dicapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap kondisi masyarakat dan potensi daerahnya, dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan layanan publik yang lebih baik (Bjornestad, 2009). Hal ini berarti otonomi daerah diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk lebih berkinerja baik dalam mengelola potensi daerah demi peningkatan pembangunan ekonomi di wilayahnya.

Dari dimensi pembangunan, kesejahteraan masyarakat diukur melalui berbagai cara penilaian taraf kesejahteraan rakyat dan melalui indikator-indikator terukur dari capaian hasil pembangunan. Sejak tahun 1990, Badan Dunia UNDP (*United Nations Development Programme*) mengadopsi suatu paradigma baru mengenai pembangunan yang disebut Paradigma Pembangunan Manusia (PPM), paradigma ini melihat manusia dari sisi yang lebih kompleks dan komprehensif, karena disamping memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, juga memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek non-ekonomi. Berdasarkan konsep tersebut, pembangunan manusia berarti meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam arti yang luas meliputi aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual dalam skala individu maupun sosial yang pada akhirnya harus mampu menjadi sumber daya pembangunan secara komprehensif. Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran serta perlu dievaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai obyek pembangunan.

Pembangunan daerah dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Kegiatan pembangunan daerah tidak terlepas dari peran seluruh pemerintah daerah dan masyarakatnya yang secara bersama-sama berinisiatif membangun daerah sehingga berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Pemerintah daerah harus dapat melihat sektor yang memiliki keunggulan serta kelemahan, mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki, dan menetapkan sektor komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan riil juga untuk meningkatkan produktifitas masyarakatnya (Amelia, 2010).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pada awal desentralisasi fiskal, transfer ke daerah berupa Dana Perimbangan (DAPER) hanya sebesar Rp. 81,1 triliun, dan meningkat sebesar 16,8 persen ditahun 2002 menjadi Rp. 94,7 triliun. Tahun 2006 Dana Perimbangan mencapai Rp. 222,2 triliun atau meningkat sebesar 55,2 persen dari tahun sebelumnya. Sampai tahun 2008, besarnya dana perimbangan telah mencapai Rp. 278,7 triliun (Zulyanto, 2010).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Selain transfer ke daerah yang mengalami pelonjakan drastis, desentralisasi dan otonomi daerah ini juga diwarnai oleh maraknya pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Jika pada tahun 1998 jumlah provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 27 propinsi, maka pada tahun 2006 bertambah menjadi 33 propinsi atau meningkat 22,2 persen. Begitu juga daerah kabupaten yang hanya semula hanya berjumlah 274 pada tahun 1999, di tahun 2006 mencapai 348 kabupaten atau meningkat 27 persen. Sedangkan daerah kota yang semula berjumlah 70 menjadi 86 daerah di tahun 2006. Pada Tahun 2008 jumlah kabupaten telah mencapai 387 dan kota 96 daerah, sehingga total daerah kabupaten/kota pada tahun 2008 sebanyak 483 daerah (Zulyanto, 2010). Mengikuti fenomena yang terjadi secara nasional, pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sampai dengan tahun 2014 merupakan provinsi yang tidak mengalami pemekaran wilayah di samping Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena tidak mengalami pemekaran wilayah, maka akan terlihat originalitas atau keaslian keutuhan wilayah kabupaten/kota sejak otonomi daerah diberlakukan mulai 1 Januari 2001 (Badrudin, 2011).

## TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan

Model hubungan desentralisasi fiskal yang bersifat *top down* dapat dianalisis dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen. Berdasarkan teori agensi, digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agen) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat (Jensen & Meckling, 1976).

Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Agen diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan menguntungkan prinsipal. Prinsipal memiliki wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumberdaya kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya sehingga dapat dilihat sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi wilayah yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Khusaini, 2006). Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follow function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Desentralisasi fiskal diukur dengan rasio antara PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Pengeluaran Total APBD. Belanja Langsung merupakan komponen pada Pengeluaran Daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam Belanja Langsung terdapat komponen Belanja Modal. Oleh karena tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat maka apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran Belanja Langsung termasuk Belanja Modal. Untuk meningkatkan anggaran Belanja Langsung yang di dalamnya terdapat komponen Belanja Modal maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Badrudin, 2012).

**Hipotesis 1: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.**

Desentralisasi fiskal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih besar untuk berinvestasi dan membelanjakan lebih banyak untuk berbagai sektor produktif (Lin dan Liu 2000, Brodjonegoro dan Vasques 2002). Pemerintah daerah mampu menyediakan barang-barang publik dan jasa yang dibutuhkan. Pemerintah lokal tetap akan lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi lokal karena pemerintah daerah pasti lebih memahami keadaan dan kemampuan sumber daya daerahnya. Pemberian kewenangan (otonomi) yang lebih besar, membuat pemda lebih leluasa melakukan alokasi yang efisien pada berbagai potensi lokal sesuai dengan kebutuhan publik (Lin dan Liu 2000, Mardiasmo 2002).

**Hipotesis 2: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.**

Lindahman dan Thurmaier (2002) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas kebutuhan dasar (*basic needs*), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk yang sehat. Mereka menggunakan variabel desentralisasi penerimaan dan pengeluaran untuk melihat variabel desentralisasi dan *human development index* untuk melihat *basic needs*.

**Hipotesis 3: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.**

## **Belanja Modal**

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri No 59 Tahun 2007 pasal 53 ayat (1), Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

nilai manfaat lebih dan 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan daerah dengan kualitas manusianya yang tinggi, pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)nya untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor tersebut. Lebih spesifiknya pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertambahan belanja modal yang juga termasuk didalamnya semakin meningkat dan baiknya infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Dengan adanya berbagai fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja modal atau pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003).

**Hipotesis 4: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.**

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan pembangunan ekonomi, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan segenap lapisan masyarakat untuk mencapai kehidupan lebih baik. Melalui Belanja Modal, pemerintah daerah dapat mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dapat membangun fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Beberapa jenis fasilitas publik tersebut akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk aktivitas non ekonomi khususnya dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan di berbagai ruang publik yang tersedia.

**Hipotesis 5: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.**

## **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 2004).

Pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu pula. Peningkatan pendapatan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih kaya, lebih sehat, dan lebih berpendidikan yang menunjukkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta terjadi pula penurunan angka kemiskinan yang ditunjukkan indikator Rasio Penduduk Miskin (RPM).

## **Hipotesis 6: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.**

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat diproxikan dengan dua indikator. Indikator pertama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator kedua yaitu Rasio Penduduk Miskin (RPM), yaitu proporsi jumlah penduduk miskin. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS menghitungnya dengan konsep Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan adanya pembangunan infrastruktur dan sarana maupun prasarana pada suatu daerah. Sumber pendanaan pembangunan berasal dari anggaran belanja modal. Artinya, apabila proporsi belanja modal meningkat, maka dana yang dimiliki daerah untuk pembangunan infrastruktur juga tinggi. Infrastruktur yang lebih baik akan memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas untuk memenuhi standar kelayakan hidupnya sehingga akan dicapai kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini berarti bahwa desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

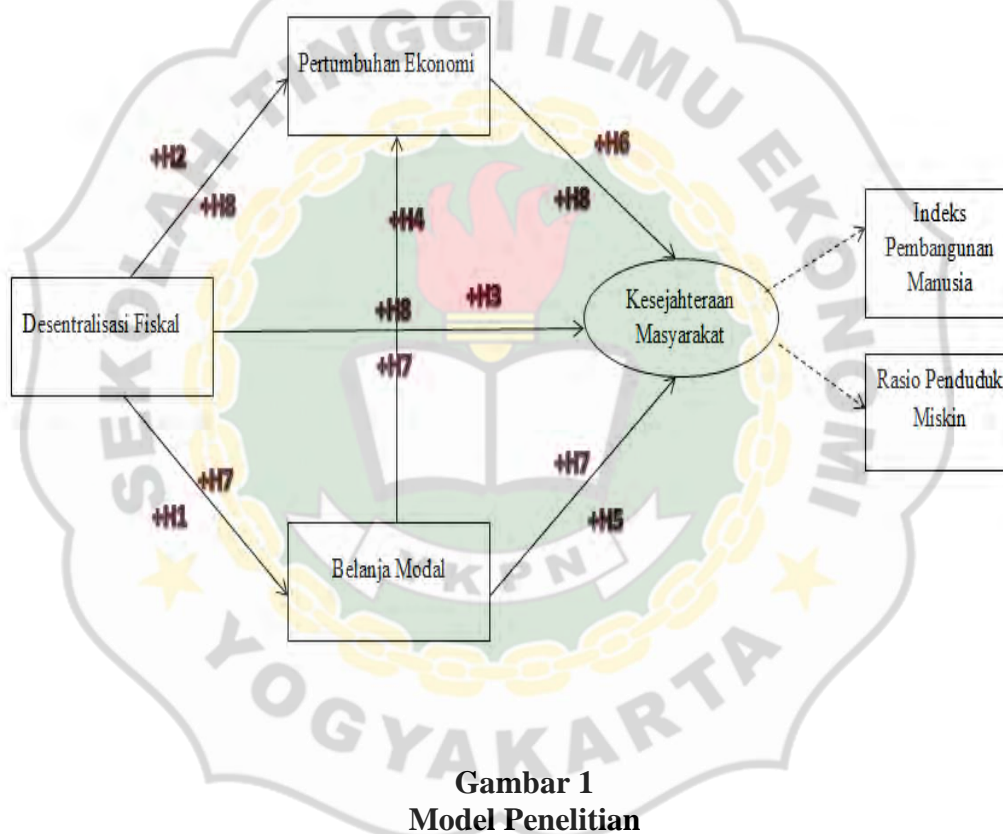
## **Hipotesis 7: Belanja Modal memediasi pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.**

Malik *et al.* (2006), menyatakan bahwa strategi yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah desentralisasi fiskal. Hal senada juga disampaikan oleh Lin dan Liu (2000), dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat mengalami perubahan yang berarti melalui desentralisasi fiskal. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah daerah akan lebih memahami kebutuhan yang diperlukan daerahnya, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan akan lebih baik dalam menjangkau permintaan dari masyarakatnya. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan publik, hingga akhirnya mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh percepatan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pertumbuhan ekonomi, namun lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat salah satunya melalui pendapatan yang diterima masyarakat. Apabila terjadi aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, maka masyarakat dapat mengalokasikan pendapatannya untuk pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya. Hal ini berarti bahwa desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

**Hipotesis 8: Pertumbuhan Ekonomi memediasi pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.**



Gambar 1  
Model Penelitian

## Metode Penelitian

### Sampel dan Data

Data penelitian ini bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) periode tahun anggaran 2010-2014. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah, angka Dana Bagi Hasil, angka Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, total Pendapatan daerah, realisasi dan anggaran Belanja Modal. Data pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang memiliki dua indikator pengukuran yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Penduduk Miskin diperoleh dari sumber Badan Pusat Statistik melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).



## Analisis Data dan Pembahasan Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki obyek studi yaitu Provinsi Jawa Tengah yang terbagi atas 35 kabupaten/kota yang membawahi sebanyak 573 kecamatan dan 8.578 kelurahan/desa. Dari 35 kabupaten/kota yang ada, 29 adalah kabupaten dan sisanya adalah kota.

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	Mean	Maximum	Minimum
Desentralisasi Fiskal	17%	45,67%	8,87%
Belanja Modal	191.648	1.886.150	25.479
Pertumbuhan Ekonomi	5,48	6,89	1,98
Indeks Pembangunan Manusia	74	79,98	58,64
Rasio Penduduk Miskin	14,48	24,58	5,04

Desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata selama tahun 2010 s.d 2014 sebesar 17%. Nilai tertinggi diraih oleh Kota Semarang sebesar 45,67% pada tahun 2012, sedangkan nilai terendah yaitu 8,87% terdapat pada Kabupaten Jepara tahun 2013. Persentase kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata sebesar 28,6%, dan sisanya 71,4% kabupaten/kota masih berada di bawah rata-rata desentralisasi fiskal.

Rata-rata belanja modal yang dialokasikan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 s.d 2014 yaitu 191.648 juta rupiah. Nilai terendah belanja modal masih jauh di bawah rata-rata yaitu sebesar 25.479 pada Kabupaten Batang di tahun 2010. Sedangkan belanja modal tertinggi sebesar 1.886.150 diraih oleh Kota Surakarta pada tahun 2012.

Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan laju pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten/kota. Rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 5,48% per tahun. Nilai tertingginya yaitu 6,89% pada Kabupaten Banyumas di tahun 2012, sedangkan nilai terendah ditunjukkan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 sebesar 1,98%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, namun cenderung stabil berada di kisaran 5,49% dan cenderung meningkat.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 s.d 2014 yang mempunyai rata-rata IPM terbesar, yaitu Kota Salatiga (79,11), disusul Kota Surakarta (78,42), Kota Semarang (78,10), dan Kota Magelang (74,91), sedang rata-rata IPM terkecil ada di Kabupaten Pemasang (60,65). Sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 s.d 2014 yang mempunyai rata-rata IPM relatif besar adalah daerah kota, sedang untuk daerah

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kabupaten, yaitu Kabupaten Sukoharjo (72,73) dan Kabupaten Karanganyar (72,16).

Kemiskinan yang dilihat berdasarkan rasio penduduk miskin menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun. Rata-rata RPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2010 s.d 2014 sebesar 14,48%. Angka kemiskinan terendah diraih oleh Kota Semarang pada tahun 2014 sebesar 5,04% dan kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Purbalingga di tahun 2010.

## **Analisis *Partial Least Square* (PLS)**

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penilaian *goodness of fit model* (*inner model* dan *outer model*) dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS).

## **Evaluasi *Goodness of Fit Model* terhadap *Outer Model***

Evaluasi *goodness of fit model* terhadap *Outer Model* diukur dengan menggunakan *convergent validity*. *Convergent validity* merupakan tingkatan sejauh mana hasil pengukuran suatu konsep menunjukkan korelasi positif dengan hasil pengukuran konsep lain yang secara teoritis harus berkorelasi positif (Bambang dan Lina, 2005). Kriteria untuk menilai apakah *outer model* memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif yaitu nilai *loading* > 0,70 dan P-signifikan yaitu  $P < 0,05$ .

**Tabel 2**  
**Nilai *Convergent Validity* Variabel Kesejahteraan Masyarakat**

Indikator	Nilai Loading	P-Value	Keterangan
Indeks Pembangunan Manusia	0,919	<0,001	Memenuhi <i>convergent validity</i>
Rasio Penduduk Miskin	-0,919	<0,001	Memenuhi <i>convergent validity</i>

Sumber: *Output* program WarpPLS 5.0

Tanda positif (+) pada koefisien *loading factor* IPM menunjukkan bahwa kontribusi IPM terhadap variabel kesejahteraan masyarakat bersamaan arah, artinya apabila kontribusi IPM meningkat maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat meningkat, sebaliknya apabila kontribusi IPM menurun maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat menurun. Tanda negatif (-) pada koefisien *loading factor* RPM menunjukkan bahwa kontribusi RPM terhadap variabel kesejahteraan masyarakat berbeda arah, artinya apabila kontribusi RPM meningkat maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat menurun, sebaliknya apabila kontribusi RPM menurun maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat meningkat.

## Evaluasi *Goodness of Fit Model* terhadap *Inner Model*

Evaluasi *goodness of fit model* berfungsi untuk mengetahui kecocokan suatu model yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel eksogen yaitu desentralisasi fiskal, variabel endogen intervening yaitu belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, serta variabel endogen tergantung yaitu kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3**  
**Hasil Model *Fit Indices***

No.	Variabel
1.	Average Path Coefficient (APC)= 0,165, P=0,006
2.	Average R-Squared (ARS)= 0,061
3.	Average block VIF (AVIF)= 1,029

Sumber: Output PLS (Olah Data)

Berdasarkan hasil analisis umum *model fit* pada Tabel 2, nilai *average path coefficient* (APC) sebesar 0,165 dengan nilai  $P = 0,006$ , menunjukkan bahwa nilai APC signifikan ( $<0,05$ ). Signifikannya nilai APC dapat membuktikan bahwa variabel independen dan dependen memiliki hubungan sebab dan akibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil pengujian *average R-Squared* (ARS) diperoleh hasil sebesar 0,061, menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 6,1% dan sisanya 93,9% dimiliki oleh variabel lain diluar model. *Average block VIF* = 1,029, diterima jika  $\leq 5$ , *ideally*  $\leq 3.3$ . Hal ini menunjukkan bahwa AVIF dapat diterima dan tidak terjadi multikolinieritas, maka model penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian model struktural, maka dilakukan pengujian hipotesis. Tabel 3 berikut adalah hasil pengujian hipotesis.

Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien ( $\beta$ ) sebesar 0,26 (bertanda positif) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap belanja modal. Tingkat signifikansinya sebesar  $<0,01$  yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05, yang berarti desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Hipotesis1 diterima. Artinya, proksi PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan tingginya porsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh terhadap

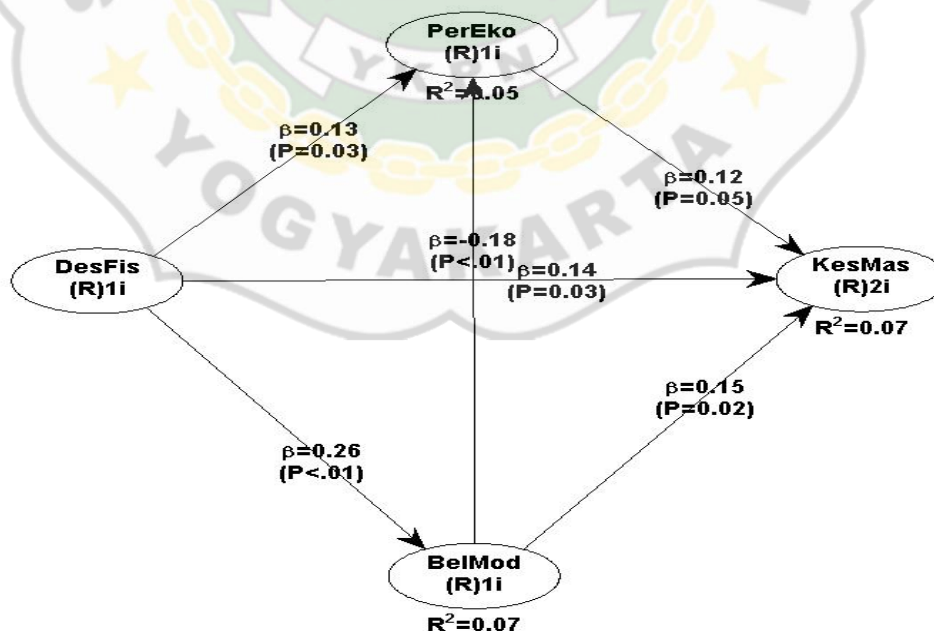
# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

desentralisasi fiskal dalam mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Prediksi	Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	P-Value	Signifikan/Tidak Signifikan	Hasil
H1	+	DesFis => BelMod	0,26	<0,01	Positif Signifikan	Diterima
H2	+	DesFis => PerEko	0,13	0,03	Positif Signifikan	Diterima
H3	+	DesFis => KesMas	0,14	0,03	Positif Signifikan	Diterima
H4	-	BelMod => PerEko	-0,18	<0,01	Negatif Signifikan	Ditolak
H5	+	BelMod => KesMas	0,15	0,02	Positif Signifikan	Diterima
H6	+	PerEko => KesMas	0,12	0,05	Positif Signifikan	Diterima

Sumber: Output PLS (Olah Data) Keterangan: DesFis: Desentralisasi Fiskal, BelMod: Belanja Modal, PerEko: Pertumbuhan Ekonomi, KesMas: Kesejahteraan Masyarakat.



**Gambar 2**  
**Hasil Output Uji Hipotesis**

Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari nilai

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

koefisien ( $\beta$ ) sebesar 0,13 (bertanda positif) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat signifikansinya sebesar 0,03 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05, yang berarti desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Hipotesis<sup>2</sup> diterima. Artinya, desentralisasi fiskal mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah mampu menyediakan barang-barang publik dan jasa yang dibutuhkan. Hal ini pada gilirannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan per kapita.

Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien ( $\beta$ ) sebesar 0,14 (bertanda positif) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat signifikansinya sebesar 0,03 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05, yang berarti desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Hipotesis<sup>3</sup> diterima. Ini berarti bahwa, dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah sudah baik dalam menyediakan fasilitas bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memenuhi *basic needs* lebih baik.

Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien ( $\beta$ ) sebesar -0,18 (bertanda negatif) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien jalur sebesar -0,18 (bertanda negatif) menunjukkan bahwa semakin meningkat belanja modal, maka semakin menurun pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya. Tingkat signifikansinya sebesar  $<0,01$  yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05, yang berarti bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Hipotesis<sup>4</sup> ditolak. Proporsi belanja modal masih lebih kecil dibandingkan belanja tidak langsung. Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran Belanja Langsung lebih besar daripada anggaran Belanja Tidak Langsung, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien ( $\beta$ ) sebesar 0,15 (bertanda positif) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat signifikansinya sebesar 0,02 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05, yang berarti desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Hipotesis<sup>5</sup> diterima. Hal ini menunjukkan Belanja Modal sebagai komponen Belanja Langsung pada Total Pengeluaran Daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien ( $\beta$ ) sebesar 0,12 (bertanda positif) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat signifikansinya sebesar 0,05 yang nilainya lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05, yang berarti pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Hipotesis6 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil estimasi ini didukung oleh data, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya seiring dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM dan penurunan RPM. Ini berarti bahwa, pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Belanja modal dapat memediasi secara parsial pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada hasil *p-value* dari pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi  $0,01 < 0,05$ ; pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tingkat signifikansi  $0,03 < 0,05$  dan pengaruh dari belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tingkat signifikansi  $0,02 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa belanja modal memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat diterima. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah. Semakin besar desentralisasi fiskal, maka semakin besar kewenangan daerah untuk mendapatkan penerimaan dari pengelolaan sumber-sumber potensi penghasil pendapatan di daerah, sehingga pemerintah dapat meningkatkan anggaran belanja modalnya yang dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat memediasi secara parsial pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada nilai *p-value* dari pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai  $p=0,03$ ; pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai  $p=0,03$  dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai  $p= 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat diterima. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila ada peningkatan pendapatan. Pemerintah sebagai stimulus dan penyedia layanan serta infrastruktur yang memadai dapat memacu aktivitas ekonomi yang diikuti dengan daya beli masyarakat yang tinggi. Aktivitas ekonomi ini menunjukkan bahwa hasil output barang dan jasa meningkat yang akan berimbas pada perubahan nilai produk domestik regional bruto yang berarti terjadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan pendapatan di masyarakat.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Masyarakat yang berpendapatan baik akan mampu memenuhi kelayakan hidupnya semakin baik pula, sehingga tercipta masyarakat yang lebih berkualitas baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan pendapatannya.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi mampu memediasi secara parsial pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan dua indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Penduduk Miskin. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dengan indikator lain, misalnya pengangguran dan indeks gini. Data yang tersedia mencakup seluruh Provinsi Jawa Tengah, padahal konsep otonomi daerah mencakup kabupaten/kota-nya. Sehingga penelitian ini belum dapat menggunakan indikator selain IPM dan RPM.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Saran untuk pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah adalah dengan menambah porsi belanja langsung yang di dalamnya terdapat komponen belanja modal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memenuhi ketentuan dalam Permendagri mengenai Pedoman Penyusunan APBD.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menambah indikator tingkat pengangguran dan indeks gini sebagai indikator pengukur kesejahteraan masyarakat. Karena, menurut laporan publikasi Badan Pusat Statistik, kondisi perekonomian makro di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 s.d 2014 terdapat indikasi tingkat pengangguran dan angka indeks gini yang cenderung mengalami kenaikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amelia, Anna. 2010. Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal, Investasi Swasta dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah: Studi Kasus Antar Provinsi di Pulau Jawa. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Badrudin,Rudy. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Disertasi. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Bjornestad L. 2009. Fiscal Decentralization, Fiscal Incentives, and Pro-Poor Outcomes: Evidence from Vietnam. *ADB Economic Working Paper Series*, No. 168, Asian Development Bank, Metro Manila.
- Dwirandra, A.A.N.B. 2013. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Keserasian Belanja Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2, Juli 2013.
- Hakim, Lukman. 2013. “Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali).”
- Hendarmin. 2012. “Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.” *Jurnal EKSOS Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 144 – 155.*
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling, 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*. Vol. V3, No. 4, October, pp. 305-360.
- Jhingan, M.L. “*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*”, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Lin dan Liu,2000. *Fiscal Decentralization and Economic growth in China. Economic Development and Cultural Change*. Chicago.Vol 49 . Hal:1-21.
- Mardiasmo. ‘Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi:2005-2008’ dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi, Penerbit Kompas, Jakarta, 2009.
- Parhah, Siti. 2002. “Kontribusi Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia *Analisis Data Cross-Section Tahun 2000.*” Yogyakarta.
- Saputra, Bambang. 2013. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Borneo Administrator / Volume 9 / No. 1 / 2013.*
- Saragih, Juli P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sasana, Hadi. 2009. “Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 103 – 124.*
- Situngkir , Freddy., Sirojuzilam, Erlina, dan Agus Suriadi. 2012. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.”
- Waluyo, Joko. 2007. “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia.” Makalah Pusat Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Widianto, Andri., Yeni Priatna Sari, Hetika. 2012. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Zulyanto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.  
[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

